

Pelaksanaan roya hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan utang:  
studi kasus: Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur = The  
implementation of mortgage deletion (roya) over land as guarantee of  
debt: case study: land office of East Jakarta

Nabila, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20485316&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Roya Partial diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Dimana untuk dapat diadakan Roya Partial harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Namun, terdapat permasalahan yakni adanya ketentuan yang bertentangan yaitu dalam Pasal 124 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Roya Partial tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pelaksanaan Roya Partial di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur dengan adanya perbedaan dasar hukum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

.....

This thesis discusses the implementation of Mortgage Partial Deletion at Land Office of East Jakarta. Partial Deletion is regulated in article 2 Law Number 4 of 1996 about Mortgage Right Over Land and Land-Related Objects. Partial deletion must be promised before in Deed of Mortgage (APHT). However, there are problem about contradictory regulations in article 124 Paragraph (2) the Agrarian State Minister Regulation/Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration (Agrarian State Minister Regulation No. 3/1997), there are provisions stating that Partial deletion does not need to be promised before in deed of Mortgage (APHT). This thesis will be discussed about the implementation of partial deletion at Land Office of East Jakarta with differences in legal basis in the Law Number 4 of 1996 about Mortgage Right Over Land and Land-Related Objects and the Agrarian State Minister Regulation/Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration.